

KLIPING BERITA

Sumber : Lombok Post

1 Februari 2023

Bima - Dompu

Hasil Audit BPK NTB, Ratusan Juta BLT Dana Desa 2022 Diduga Disalahgunakan

Editor: Galih Mps  1 Februari 2023



PENERIMA BLT: Seorang warga menunjukkan uang BLT yang baru saja diterima dari pemerintah desa, belum lama ini.(DOK JPC)

BIMA-Ratusan juta anggaran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tahun 2022 diduga disalahgunakan. Beberapa desa di Kabupaten Bima belum sepenuhnya menyalurkan hak warga itu. Malah digunakan untuk kegiatan desa. Parahnya lagi, sebagian anggaran dipakai untuk kepentingan pribadi Kepala Desa (Kades).

Hal itu terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK NTB. Dari reviu dokumen penyaluran dan pemeriksaan kas desa, lembaga auditor bermarkas di Jalan Udayana ini menemukan dana BLT belum disalurkan kepada Kelompok Penerima Masyarakat (KPM). Sebagian desa menggunakan untuk mendanai kegiatan desa atau kepentingan pribadi kades.

Misalkan di Desa Sie, Kecamatan Monta, Bima. Di sana, ada 108 KPM penerima BLT. Dalam laporannya, Pemerintah Desa (Pemdes) Sie telah merealisasikan BLT Desa tahap I sampai tahap IV Rp 388.800.000.

Hanya saja, dari hasil pemeriksaan BPK, Pemdes Sie ternyata baru menyalurkan BLT sampai tahap III. Sementara, BLT tahap IV belum dibagikan.

Dalam temuan BPK, uang BLT yang belum dibagikan Rp 105.400.000. Anggaran itu diketahui masih berada di tangan bendahara desa Rp 15 juta, digunakan untuk mendanai kegiatan HUT RI Rp 4 juta, kegiatan PKK Rp 5 juta.

Dana BLT juga dipakai untuk menutupi pengeluaran Pilkades Rp 9.787.000, hadiah festival Rp 6.525.000, kegiatan MTQ Rp 30 juta, dan untuk talangan beli kursi senilai Rp 35.088.000.

Temuan yang sama di Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora. BPK menemukan dana BLT tahap IV yang belum dibagikan kepada 107 KPM. Nilainya Rp 86.400.000.

Pemdes memakai dana BLT untuk keperluan lain. Rinciannya, untuk menyelesaikan sengketa lahan dengan PT Sanggar Agro Rp 20.200.000 dan masih di bendahara Rp 66 juta.

Begitu juga dengan Desa Nanga Wera. Pemdes setempat mengklaim telah merealisasikan BLT sampai tahap III kepada 99 KPM sebesar Rp 267.300.000. Namun BPK menemukan selisih uang Rp 123.900.000 yang digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan desa.

Uang tersebut diketahui dibagi-bagi sebagai sumbangan kepada warga Rp 40.600.000, sumbangan kegiatan STQ dan HUT 17 Agustus Rp 2 juta. Lalu, pengadaan baju gerak jalan cepat Rp 5.670.000, danai kegiatan mahasiswa KKN Rp 10 juta, pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan 2022 Rp 26.191.921.

Kemudian, pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan (hutang kepala desa sebelumnya) Rp 38.149.328, transportasi dan akomodasi pawai budaya kecamatan Rp 1.250.000.

Temuan serupa terjadi juga di Desa Rai Oi. Pemdes melaporkan telah menyalurkan BLT kepada 121 sampai tahap IV Rp 435.600.000. Namun dari hasil pemeriksaan, Pemdes Rai Oi baru menyalurkan sampai tahap III. Padahal anggaran BLT tahap IV sudah dicairkan.

BPK mengungkap dana BLT yang belum dibagikan Rp 108.900.000. Sebagian digunakan untuk membiayai kegiatan desa dan kepentingan pribadi Kades. Rinciannya, digunakan mendanai kegiatan Rai Oi Voli Cup Rp 60 juta, gerak jalan Rp 15 juta, dan dimanfaatkan pribadi Kades Rp 32.900.000.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Bima Abdul Wahab Usman yang dikonfirmasi *Lombok Post* belum memberikan penjelasan. Dia beralasan sedang sibuk. "Masih rapat," jawab dia via pesan singkat WhatsApp kepada Koran ini.

(man/r8)